

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Cilincing berjumlah penduduk 55.174 jiwa memiliki luas wilayah sebesar 8,312 km² (Badan Pusat Statistik, 2019). Sebagai bangsa yang didominasi perairan, sektor informal menyumbang 30% melalui kehadiran nelayan di Indonesia. DKI Jakarta adalah provinsi dengan populasi nelayan yang cukup besar di Indonesia (Rosni,2017). Sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yang dialokasikan kepada bidang pendidikan paling besar dibandingkan dengan provinsi lain. Pada tahun 2022, anggaran pendidikan di DKI Jakarta mencapai angka Rp 16,7 triliun.dari total Rp 78,5 triliun total alokasi dana APBN untuk pendidikan pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun, hal ini berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di DKI Jakarta. Sebagai Provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia, merupakan sebuah fakta yang menyakitkan untuk mengetahui bahwa angka putus sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta mengalami putus sekolah (Badan Pusat Statistik, 2022)

Kelurahan Cilincing merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jakarta Utara. Kelurahan Cilincing adalah sebuah kota di Kecamatan Cilincing yang sebagian besar memiliki keadaan buruh yang sebagian besar dikonsumsi di daerah kasual di mana pemancing menjadi pekerjaan kasual terbesar kedua di dalamnya. Rata-rata upah/gaji bersih masyarakat Jakarta Utara sebesar Rp. 2.660.000,00/bln pada sektor informal (Badan Pusat Statistik Ketenagakerjaan, 2019). Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Di NSB, sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal (Tri Widodo, 2006). Hal ini juga

perkuat oleh data penduduk Jakarta utara yang berusia 15 tahun keatas sejumlah 868.208 memiliki kegiatan sebagai seorang pekerja dan 75% terjadi pada anggota keluarga sektor informal (Badan Pusat Statistik, 2019).

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Umumnya, pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup (survival). Mereka harus tinggal di pemukiman kumuh, dimana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim.

Berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Jakarta Utara penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang SMA/Sederajat sebanyak 54,67% (Badan Pusat Statistik, 2018). APM sendiri adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini menunjukkan partisipasi terhadap sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu dan juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Di Jakarta Utara, anak yang telah mendaftar dan sedang mengenyam pendidikan formal yang aktif mengikuti pendidikan tetapi tidak lagi terdaftar sebagai siswa pada saat pencacahan dianggap tidak bersekolah lagi. Angka Putus Sekolah di DKI Jakarta sebesar 22,52%. Angka tersebut merupakan persentase rata-rata dari putus sekolah yang terjadi berdasarkan rasio jenis kelamin di DKI Jakarta. Jumlah putus sekolah pada laki-laki usia 16-18 Tahun di DKI Jakarta sebesar 24,56% dan pada perempuan usia 16-18 Tahun sebesar 20,35% (Badan Pusat Statistik, 2022). Putus sekolah merupakan sebuah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu (Susetyo, 2016). Putus sekolah dapat terjadi dikarenakan banyak faktor. Setidaknya, ada enam faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau jarak sekolah (Burhanuddin, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatin Pebriana dengan judul skripsi Faktor-Faktor Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun 2011. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan penyebab anak putus sekolah dari faktor ekonomi keluarga dan perhatian orang tua. Dari faktor ekonomi keluarga antara lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah mengakibatkan terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup termasuk pendidikan. (Febriana, 2011). Pendidikan merupakan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari tiap manusia. Melalui pendidikan tiap individu diharapkan dapat mengembangkan potensi diri guna memperoleh masa depan yang lebih baik bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya. Pemerintah terus berupaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pendidikan diantaranya bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM) dan lain sebagainya. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adanya bantuan dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah) dari pemerintah memang sangat membantu mengikis angka putus sekolah. Tetapi, keterbatasan perekonomian masyarakat khususnya pada sektor informal membuat peluang akan putus sekolah menjadi kembali muncul.

Pemerintah sudah sangat serius terkait meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait pendidikan. Salah satunya adalah tentang program kebijakan wajib belajar. Awalnya program wajib belajar ini ditujukan selama 9 Tahun waktu belajar. Artinya, anak usia sekolah mendapat subsidi penuh untuk dapat

bersekolah selama 9 tahun. Program ini tercantum dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar yang merealisasikan UU Sidiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003. Kemudian untuk melanjutkan program wajib belajar 9 tahun tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013. Salah satu daerah yang melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun adalah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tercantum pada Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.” Pasal 16 huruf (f) yang berbunyi “Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.”

Anak usia sekolah memiliki kewajiban yaitu belajar. Anak usia sekolah umumnya termasuk usia *non produktif*, yaitu usia yang belum masuk pada usia kerja. Usia *non produktif* berupa kelompok umur 0-14 tahun (usia muda) dan 65 tahun ke atas(usia tua). Tetapi, tidak sedikit anak usia sekolah yang sudah termasuk di dalam usia produktif (Safirah Sarayati, 2014). Penduduk usia produktif adalah usia yang menghasilkan barang dan jasa. BPS mengambil umur 10 tahun ke atas sebagai usia kerja. Akan tetapi mulai dari tahun 1998 mulai memakai usia 15 tahun ataupun lebih tua dari batas usia kerja pada tahun sebelumnya (Anwar & Fatmawati, 2016). Usia sekolah yang beririsan dengan usia produktif ini merupakan salah satu yang menjadi alasan mengapa banyak anak usia sekolah lebih memilih untuk bekerja ketimbang sekolah diusianya. Keterbatasan ekonomi memperkuat alasan untuk tetap bekerja. Sektor informal disini memiliki kerentanan akan putus sekolah yang cukup tinggi. Hal ini serupa dengan hasil penelitian dari Kamsihyati et al. (2016) bahwa, putus sekolah dapat terjadi salah satunya akibat faktor ekonomi dalam bentuk kurangnya perhatian orang tua terhadap penyediaan perlengkapan dan sarana belajar. Konsep

kerentanan pada dasarnya muncul akibat adanya permasalahan kemiskinan.

Kerentanan sosial wilayah menggambarkan kerapuhan sosial dari suatu wilayah akibat pengaruh dari adanya bahaya, ancaman dan bencana yang memiliki potensi merusak, mengganggu serta merugikan. Kerentanan terhadap putus sekolah ini dapat terjadi jika anak usia sekolah pada keluarga sektor informal ini lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya dibanding untuk sekolah. Sehingga, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena, dapat mengetahui apakah anggota keluarga sektor informal memiliki kerentanan terhadap putus sekolah. Adapun nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu pemerintah Kelurahan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk dapat memperhatikan sektor informal lebih baik dari sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang bisa diidentifikasi permasalahannya, adalah:

1. Kerentanan putus sekolah anggota keluarga usia 16-18 dengan kepala keluarga yang bekerja pada sektor informal dengan jumlah putus sekolah di DKI Jakarta sebanyak 75.303 anak.
2. Sebanyak 868.208 orang diatas 15 tahun merupakan pekerja dan 30-70% dari total berasal dari sektor informal.
3. Pendapatan rata-rata sektor informal di cilincing sebesar Rp. 3.000.000 dimana jumlah tersebut berada di bawah upah minimum di DKI Jakarta.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang telah teridentifikasi. Maka dari itu, masalah pada penelitian ini dibatasi pada kerentanan putus sekolah yang berpeluang terjadi di Anggota keluarga usia 16-18 tahun dengan kepala keluarga yang bekerja pada sektor informal, di Kelurahan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini yaitu: “Apakah anggota keluarga usia 16-18 tahun dengan kepala keluarga yang bekerja pada sektor informal rentan mengalami putus sekolah?”

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian ini memiliki tujuan yang berguna bagi masyarakat Kelurahan Cilincing khususnya pada Sektor Informal adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat berdasarkan teoritis mempunyai tujuan untuk mendalami pengetahuan tentang kerentanan putus sekolah, khususnya pada sektor informal sehingga nantinya penelitian ini dapat digunakan menjadi rekomendasi terhadap masalah putus sekolah pada sektor-sektor lainnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak berwenang seperti Pemerintah daerah dalam memperhatikan sektor- sektor tidak resmi seperti sektor informal terutama dalam bidang pendidikan.